

**ANALISIS PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

SKRIPSI

**RAHMAD HIDAYAT
NIM : 17622204**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

**ANALISIS PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

**RAHMAD HIDAYAT
NIM : 17622204**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

RAHMAD HIDAYAT
NIM : 17622204

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN. 1004117701 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Masyitah As Sahara, SE., M.Si
NIDN. 1010109101 / Asisten Ahli

Mengetahui,

Pt. Ketua Program Studi,



Hendy Satria, SE., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : RAHMAD HIDAYAT
NIM : 17622204

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



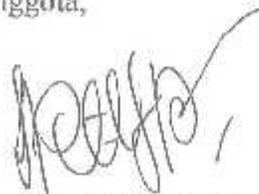
Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN. 1004117701/ Lektor

Sekretaris,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDK. 8833900016/ Asisten Ahli

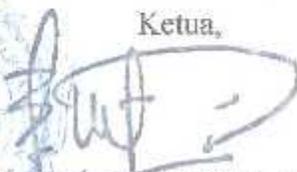
Anggota,



Rachmad Chartady, S.E., M.Ak
NIDN. 1021039101/ Asisten Ahli

Tanjungpinang, 30 Januari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Ketua,




Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801/ Lektor

PERNYATAAN

Nama : Rahmad Hidayat
NIM : 17622204
Tahun Angkatan : 2017
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,22
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pajak Sektor Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Januari 2020

Penyusun,



RAHMAD HIDAYAT
NIM. 17622204

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah atas ridha Allah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan usaha, kerja keras serta doa orang tua yang selalu mengiringi setiap perjuangan saya.

Saya persembahkan skripsi ini kepada orang tua saya, yang telah membesarkan saya dengan sangat baik, yang selalu mendidik saya dari kecil hingga saat ini, yang telah sabar dan begitu banyak memberi semua yang terbaik untuk saya,

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk istri dan keluarga kecil saya yang selalu memberi *support*, dorongan, masukan, saran, nasehat, dan motivasi yang tak terhitung jumlahnya, menjadi *booster* tersendiri buat saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga untuk teman-teman yang selalu memberi, masukan, saran, nasehat, dan motivasi yang tak terhitung jumlahnya, Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal, aamiin.

HALAMAN MOTTO

“Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

(Q.S At-Tholaq : 4)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqoroh: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyiroh: 5)

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S Al-Mujadilah: 11)

“Man Jadda Wa Jada”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakaatuh, Alhamdulillahrabbi' alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisa Pajak Sektor Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas** ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, selain itu skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi, tata bahasa maupun tata cara dalam penulisan untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan motivasi serta bimbingan dari beberapa pihak. Berkenaan dengan hal tersebut pada kesempatan kali ini penulis dengan ketulusan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak.CA., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

2. Ibu Ranti Utami, SE.M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I dan Plt.Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang sekaligus Dosen Pembimbing 1 bagi penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.M.Ak.M.Si.CA. selaku Wakil Ketua II dan Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Hendy Satria, SE.M.Ak. selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Ibu Masyitah As Sahara, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh Staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
7. Untuk kedua orangtua tercinta, Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Nurlaila yang penuh dengan kesabaran dan pengorbanannya selalu memberikan dorongan, bantuan material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Untuk istri tercinta Yuli Triwidiani yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Pulau Penyengat Tahun 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang terus bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis ikut mendoakan semoga semua amal kebaikan pihak-pihak sebagaimana tercantum di atas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Tanjungpinang, Januari 2020

Penulis

Rahmad Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori	8
2.1.1 Pendapatan Daerah	8
A. Pendapatan Asli Daerah	8
B. Dana Perimbangan	16
C. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17
D. Pinjaman Daerah	17
2.1.2 Pariwisata	18
2.1.3 Kontribusi, Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas	21
2.2 Kerangka Pemikiran	26
2.3 Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	34

3.2 Jenis Data	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4 Teknik Pengelolaan Data	35
3.5 Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Anambas	38
4.2 Penyajian Data	46
4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	58
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah KKA	4
Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli daerah KKA	46
Tabel 4.2	Laporan realisasi Anggaran Pajak Sektor Pariwisata KKA.....	47
Tabel 4.3	Kontribusi Pajak Sektor Pariwisata Dalam PAD.....	49
Tabel 4.4	Pertumbuhan Pajak Sektor Pariwisata	51
Tabel 4.5	Efisiensi Pajak Sektor Pariwisata	53
Tabel 4.6	Pengukuran Efektivitas Pajak Sektor Pariwisata di KKA	54

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1	Grafik Realisasi PAD KKA.....	46
Gambar 4.2	Grafik Pertumbuhan Pajak Sektor Pariwisata KKA.....	52

ABSTRAK

ANALISA PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Rahmad Hidayat 17622204 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang. rahmad.hidayat201@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kontribusi pajak sektor pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah, (2) menganalisis tingkat pertumbuhan pajak sektor pariwisata terhadap PAD, (3) menganalisis tingkat efisiensi pemungutan pajak sektor pariwisata, dan (4) menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak sektor pariwisata dengan menggunakan rumus rasio kontribusi, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu berupa deskriptif kuantitatif menggunakan rumus Rasio Kontribusi, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak sektor pariwisata kabupaten kepulauan anambas dilihat dari (1) Rasio Kontribusi dapat dikategorikan sangat berkontribusi karena rata-rata kontribusi pertahunnya sebesar 32,83% selama lima tahun terakhir. (2) Rasio Pertumbuhan pajak sektor pariwisata dikategorikan berfluktuatif dari tahun ke tahun. (3) Rasio Efisiensi dikategorikan sangat efisien karena rata-rata biaya pemungutan pajak sektor pariwisata dari tahun ketahun tidak melebihi 5%. (4) Rasio Efektivitas dikategorikan sangat efektif karena rata-rata efektivitas pemungutan pajak sektor pariwisata selama lima tahun melebihi 100%.

Kata Kunci : Pajak Sektor Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT
**TOURISM SECTOR TAX ANALYSIS IN INCREASING THE ORIGINAL
REVENUE INCOME IN ANAMBAS ISLAND DISTRICT**

*Rahmad Hidayat 17622204 Accounting College of Economics (STIE)
Tanjungpinang Development. rahmad.hidayat201@gmail.com*

This study aims to (1) analyze the contribution of the tourism sector tax in increasing local revenue, (2) analyze the level of tourism sector tax growth towards PAD, (3) analyze the level of efficiency of tax collection in the tourism sector, and (4) analyze the effectiveness of tax collection the tourism sector uses the formula of contribution ratio, growth ratio, efficiency ratio and effectiveness ratio.

This research is a quantitative descriptive research. This research was conducted at the Regional Finance Agency of Anambas Islands Regency. Data collection uses the documentation method. The data analysis technique used is quantitative descriptive using the formula of Contribution Ratio, Growth Ratio, Efficiency Ratio and Effectiveness Ratio.

The results of the analysis show that the tourism sector tax in Anambas Islands Regency seen from (1) Contribution Ratio can be categorized as very contributing because the average annual contribution is 32.83% over the last five years. (2) The tax growth ratio of the tourism sector is categorized fluctuating from year to year. (3) Efficiency Ratio is categorized as very efficient because the average cost of tax collection in the tourism sector from year to year does not exceed 5%. (4) Effectiveness Ratio is categorized as very effective because the average effectiveness of tax collection in the tourism sector for five years exceeds 100%.

Keywords: Tourism Sector Tax, Local Revenue

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintah diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya. Salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup

memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah sangat memerlukan pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu berasal dari bantuan dan sumbangan dari pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Upaya untuk memperbesar peran pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu mencermati sektor-sektor strategis yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu sektor yang mampu menyumbangkan PAD diperoleh dari sektor kepariwisataan, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti : jumlah objek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, jumlah hotel atau penginapan dan tempat hiburan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian

pendapatan daerah sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Kepulauan Anambas yang dinobatkan sebagai Kepulauan terbaik di Asia menjadikan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sektor pariwisata secara riil merupakan salah satu sektor strategis penggerak pembangunan perekonomian daerah dalam usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa,. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu kabupaten yang dianggap mempunyai potensi pariwisata maka sudah selayaknya kabupaten kepulauan anambas berperan aktif terhadap pengembangan sektor pariwisata agar dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2014-2018

TAHUN	TARGET PAD (Rp)	REALISASI PAD (Rp)
2014	32.844.212.820,93	21.489.585.792,80
2015	21.316.122.457,00	17.218.368.877,96
2016	29.662.717.410,00	34.180.165.616,08
2017	38.147.948.165,00	43.788.185.055,54
2018	35.976.243.566,00	35.017.491.279,23

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat selama lima tahun terakhir bahwa realisasi pada tahun 2014 dan 2015 tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang telah dibuat pemerintah kabupaten kepulauan anambas, pada tahun 2016 dan 2017 tingkat realisasi pendapatan asli daerahnya sudah melebihi target yang telah dibuat pemerintah daerah kabupaten kepulauan anambas. sedangkan pada tahun 2018 realisasi pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan anambas kembali tidak

mencapai target realisasi yang telah ditentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Pajak Sektor Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi pajak sektor pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten kepulauan anambas?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan Pajak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten kepulauan anambas?
3. Bagaimana tingkat efisiensi pemungutan pajak sektor pariwisata di kabupaten kepulauan anambas?
4. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak sektor pariwisata di kabupaten kepulauan anambas?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi jumlah dari Laporan Realisasi Anggaran yang akan digunakan yaitu dari tahun 2014 sampai

dengan 2018. Peneliti juga membatasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata menjadi tiga yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kontribusi pajak sektor pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten kepulauan anambas.
2. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan pajak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten kepulauan anambas.
3. Untuk menganalisis tingkat efisiensi pemungutan pajak sektor pariwisata di kabupaten kepulauan anambas.
4. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak sektor pariwisata di kabupaten kepulauan anambas.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi penulis, menambah pengalaman dan pengetahuan terutama dibidang akuntansi sektor publik dan dapat mengaplikasikan teori dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.
2. Bagi pemerintah daerah, dapat digunakan sebagai panduan dalam mengevaluasi retribusi atau pajak sektor pariwisata dan mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) terutama yang berasal dari retribusi atau pajak sektor pariwisata.
3. Bagi pembaca, sebagai penambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi.

1.6 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan ini adalah untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan jadwal penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. pendapatan daerah meliputi :

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)

Menurut Adisasmita (2011) Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal.

Sedangkan menurut (Halim, 2012) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Adapun tujuan PAD yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah merupakan iuran wajib yang harus dilakukan seseorang atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang diterima.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2014 Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Halim (2012) pajak daerah dapat dibagi menurut wilayah pemungutan pajak :

a. Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi, sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak Kabupaten atau Kota :

Jenis pajak kabupaten, sebagai berikut :

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak parkir.
8. Pajak air tanah.
9. Pajak sarang burung wallet.
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
11. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

b. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup

juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

c. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

d. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

e. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan menganjurkan mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

f. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh sumber lain.

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

h. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

i. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

j. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

k. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

l. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan tanah dan/atau bangunan

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat mengatakan bahwa retribusi adalah pungutan pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang langsung dapat dirasakan langsung oleh pembayar retribusi.

Menurut Suandy (2014) dalam bukunya “Hukum Pajak” mendefinisikan pengertian retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Sedangkan Siahhan (2010) dalam bukunya “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” Mendefinisikan retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduknya secara perorangan. Definisi selanjutnya retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berikut subjek retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

a. Subjek retribusi jasa umum

Orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek ini merupakan wajib retribusi jasa umum.

b. Subjek retribusi jasa usaha

Orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini merupakan wajib retribusi jasa usaha.

c. Subjek retribusi perizinan tertentu

Orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini merupakan wajib retribusi perizinan tertentu

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil perusahaan daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, atau apapun bentuk lain, sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam desentralisasi

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun dalam bentuk barang dan atau/jasa, termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali

D. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah jenis pinjaman daerah terdiri atas :

1. Pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pinjaman ini bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
2. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. Pinjaman ini bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat.

3. Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan. Pinjaman ini bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat.

2.1.2 Pariwisata

A. Pengertian

Pariwisata merupakan kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kesenangan, kenikmatan, mencari kepuasan, mendapatkan pengalaman, mencari sesuatu yang mungkin baru, memperbaiki kesehatan, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang dimaksud kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Baiquni (2011) Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan perorangan atau kelompok, meninggalkan tempat tinggal mereka menuju suatu tempat tujuan wisata dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk

bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan kunjungan ini dimaksud hanya bersifat sementara.

Menurut Supriono (2010) Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Objek Wisata adalah suatu tempat yang mempunyai keindahan dan dapat dijadikan sebagai tempat hiburan bagi orang yang berlibur dalam upaya memenuhi kebutuhan rohani dan menemukan cinta keindahan alam.

B. Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 23 tentang Kepariwisataan maka kewajiban pemerintah/ pemerintah daerah adalah :

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum
3. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali.

4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak negative bagi masyarakat luas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 30 tentang Kepariwisataaan maka wewenang pemerintah kabupaten adalah :

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten.
2. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten.
3. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten.
4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
5. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan wilayahnya.
6. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya.
7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
8. Penyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten.
9. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayahnya.
10. Penyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.
11. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

C. Jenis Objek Wisata

Penggolongan jenis objek wisata adalah sebagai berikut :

1. Objek wisata budaya.
2. Objek wisata alam.
3. Objek wisata buatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri dari :

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

2.1.3. Kontribusi, Pertumbuhan, Efisiensi dan Efektivitas

A. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan, uang iuran. Berdasarkan pengertian tersebut jika dihubungkan dengan retribusi pariwisata maka, berarti sumbangan uang iuran yang berasal dari penerimaan retribusi pariwisata dibagi dengan PAD. Menurut Halim (2012) untuk mengetahui kontribusi dari pajak pariwisata terhadap PAD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Sektor Pariwisata}_n}{\text{Total PAD}_n} \times 100\%$$

Keterangan :

Kontribusi : Persentase pajak sektor pariwisata terhadap total pendapatan daerah

Pajak sektor pariwisata_n : Besarnya pajak sektor pariwisata dalam tahun n

Total PAD_n : Total PAD tahun n

B. Pengertian Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah hal dalam keadaan tumbuh. Untuk mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan pajak sektor pariwisata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : (Halim, 2012)

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx : Laju pertumbuhan pajak sektor pariwisata pertahun

X_t : Realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata pada tahun tertentu

X_(t-1) : Realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata pada tahun sebelumnya.

C. Pengertian Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2016) Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang

dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar daripada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula efisiensi yang dicapai

Menurut Mahmudi (2010) Efisiensi adalah sejauh mana unit yang mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efisiensi adalah mengukur bagian dari hasil pajak hotel dan restoran yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak hotel dan restoran efisiensi juga mempertimbangkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak (waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor-kantor departemen dan lembaga lain yang dihabiskan untuk membantu kegiatan memungut pajak dan sebagainya).

Menurut Amanda (2010) menyatakan bahwa efisiensi dibagi menjadi dua pengertian. Pertama, efisiensi Teknis (*technical efficiency*) yaitu pilihan proses produksi yang kemudian menghasilkan output tertentu dengan meminimalisasi sumberdaya. Kondisi efisiensi teknis ini digambarkan oleh titik di sepanjang kurva isoquan. Kedua, efisiensi ekonomis (*cost efficiency*) yaitu bahwa pilihan apapun teknik yang digunakan dalam kegiatan produksi haruslah yang meminimumkan biaya. Pada efisiensi ekonomis, kegiatan perusahaan akan dibatasi oleh garis anggaran (*isocost*) yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Efisiensi produksi yang dipilih adalah efisiensi yang di dalamnya terkandung efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis.

Sedangkan menurut Adisasmita (2011) mengungkapkan Pengertian Efisiensi merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti

Efisiensi adalah mengukur perbandingan biaya pemungutan pajak sektor pariwisata dengan realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata. Pajak sektor pariwisata dikatakan efisien apabila tingkat efisiensi kurang dari 100%. Rumus pengukuran efisiensi (Khusufi dan Halim, 2012)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan pajak sektor pariwisata}}{\text{Realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata}} \times 100\%$$

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 faktor penentu efisiensi adalah :

- a. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- c. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- d. Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat. Dengan demikian efisiensi

yang dihasilkan dapat tercapai sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Rasio efisiensi dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pajak daerah tersebut dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Secara umum nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut : (Khusufi dan Halim, 2012).

- a. Sangat efisien : <10%.
- b. Efisien : 10% - 20%
- c. Cukup efisien : 21% - 30%
- d. Kurang efisien : 31% - 40%
- e. Tidak efisien : >40%

D. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas

dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. (Khusufi dan Halim, 2012)

Efektivitas adalah mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pariwisata dengan target penerimaan retribusi pariwisata. Retribusi pariwisata dikatakan efektif apabila tingkat efektivitas lebih besar atau sama dengan 100%.

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

- a. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- d. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
- e. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Rumus mengukur efektivitas (Khusufi dan Halim, 2012)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata}}{\text{Target penerimaan pajak sektor pariwisata}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan Kontribusi Pajak sektor pariwisata, pertumbuhan pajak sektor pariwisata, efisiensi dan

efektivitas pajak sektor pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kontribusi adalah sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang terkumpul dari pajak sektor pariwisata disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan asli daerah.

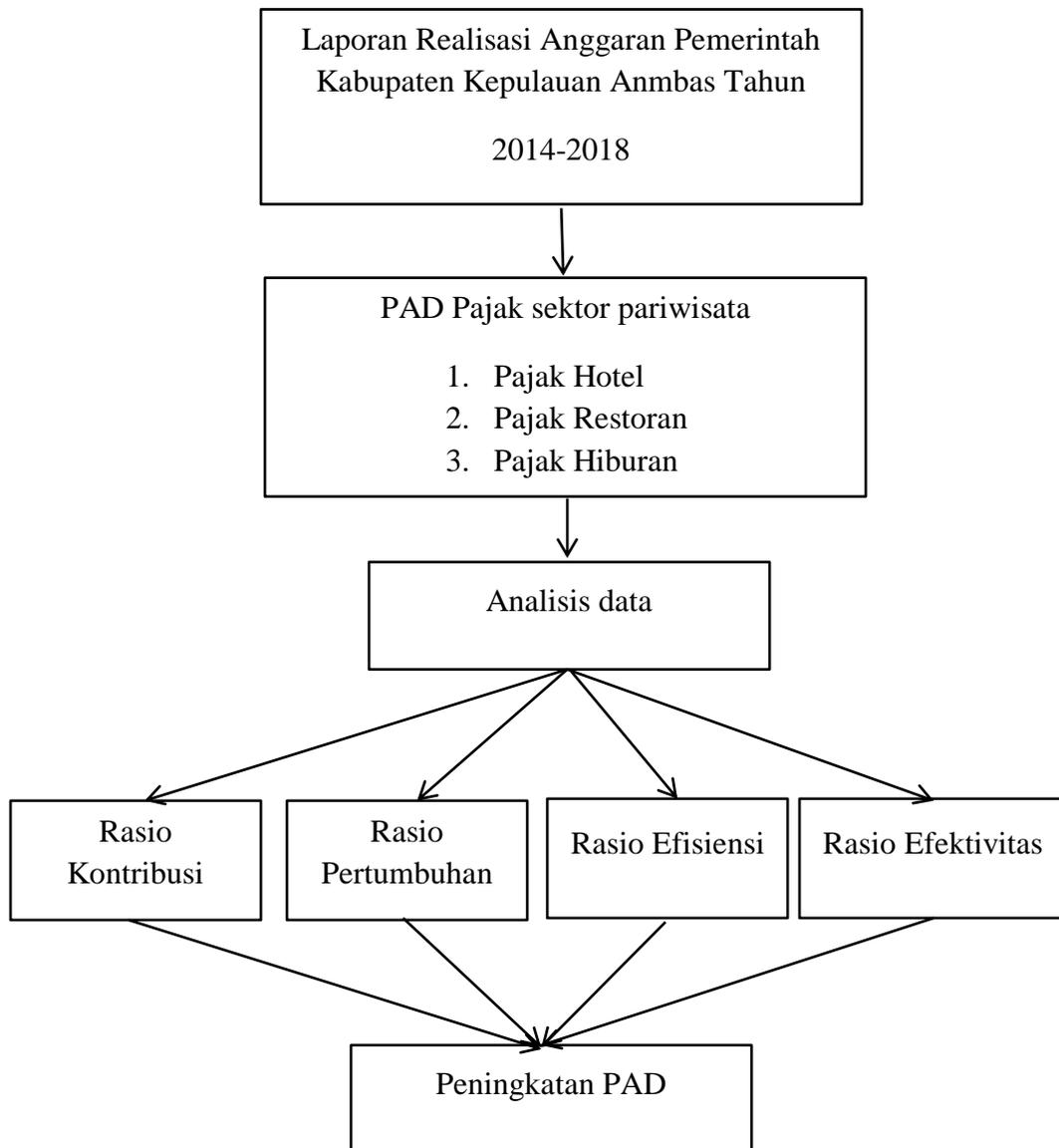
Pertumbuhan adalah selisih realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata pada tahun tertentu dengan realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata tahun sebelumnya dibagi dengan realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata pada tahun sebelumnya.

Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%. Yang didapat dari perhitungan intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah.

Efisiensi Pajak Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5%. Perhitungan efisiensi pajak daerah dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan retribusi daerah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2019)

2.3 Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Hastuti (2010) meneliti tentang analisis retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. Tujuan Penelitian ini

untuk mengetahui besarnya kontribusi, laju pertumbuhan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas pemungutan retribusi sektor pariwisata (Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Ijin Usaha Pariwisata) terhadap PAD di Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus kontribusi, laju pertumbuhan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2005 kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap PAD sebesar 3,51%, pada tahun 2006 sebesar 2,14%, pada tahun 2007 sebesar 3,39% tahun 2008 sebesar 4,03% dan pada tahun 2009 sebesar 4,25%. Laju pertumbuhan Retribusi Pariwisata pada tahun 2006 sebesar -22,33%, tahun 2007 sebesar 53,33%, tahun 2008 sebesar 35,52% dan pada tahun 2009 sebesar 23,33%. Efisiensi pemungutan Retribusi Pariwisata pada tahun 2005 adalah 32,5%, tahun 2006 sebesar 52,7%, tahun 2007 sebesar 61,3%, pada tahun 2008 sebesar 59,100, dan pada tahun 2009 sebesar 51%. Efektivitas pemungutan Retribusi Pariwisata pada tahun 2005 adalah sebesar 106.040, tahun 2006 sebesar 85,05%, tahun 2007 sebesar 108.9600 dan 12900 pada tahun 2008 sebesar 125,99% pada tahun 2009.

Muhani (2012) meneliti tentang Peranan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah pendapatan

asli daerah di Kota Palopo dari sektor pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode regresi linier sederhana dengan memecahkan pemasalahannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Variabel independen berupa sektor pariwisata, retribusi daerah dan variabel dependen berupa pendapatan asli daerah. Data yang di analisis bersumber dari pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palopo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa jumlah pendapatan sektor pariwisata mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan faktor jumlah wisatawan yang tidak sesuai dengan hasil analisis regresi sederhana diperoleh koefisien korelasi antara retribusi pariwisata dengan pendapatan asli daerah di Kota Palopo sebesar 70% ini menunjukkan bahwa, diantara kedua variabel memiliki hubungan yang positif dan signifikan.

Zulmi (2018) meneliti tentang Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung. Peranan Sektor Pariwisata di dalam suatu daerah atau negara dapat dilihat seberapa besar Peranan Sektor Pariwisata tersebut dapat berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel Jumlah Hotel, Jumlah Restoran, Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Wisatawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di dapat dari

Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan , Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk). Jenis data yang digunakan adalah data time series yaitu pada tahun 2012 sampai 2017 dan data cross section dengan cakupan 14 wilayah kabupaten/kota. Namun, pada Kabupaten Pesawaran tidak diikutsertakan karena tidak terdapat data yang dibutuhkan. Metode analisis yang digunakan Random Effect Model. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, jumlah hotel, jumlah restoran, dan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan. Sedangkan, jumlah objek wisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, Karena masih banyaknya objek wisata yang dikelola oleh masyarakat dan belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah.

Puspitasari, (2014), dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013”. Hasil penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya. (5) Analisis uji beda t-

tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.

Rombang (2013) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2012”. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Hasil penelitian menunjukan Potensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara begitu besar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun dari tahun 2008-2015. Rata-rata sebesar 88,55% dan sangat berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Yuliandari (2017) The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase the Original Regional Income (PAD) in Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kinerja serta kontribusi pengumpulan pajak dari hotel dan restoran Pendapatan Asli Daerah di Mataram dari 2011 hingga 2016. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk studi kasus sebagai pengumpulan data. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dari hotel dan restoran di Mataram dianggap dalam kategori efektif dan efisien. Sementara itu, kontribusi pengumpulan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah adalah 0,27% dan 0,13% terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian, pajak hotel dan

restoran memberikan kontribusi yang baik terhadap pajak daerah dan Pendapatan asli daerah di Mataram. Selain itu, kinerja hotel dan pajak restoran dalam kategori berkembang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Pajak Sektor Pariwisata Dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan dalam bab ini.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan rumus rasio, merupakan jenis penelitaian tentang subjek tertentu dimana subjek tersebut terbatas, maka kesimpulan yang yang diperoleh hanya berlaku sebatas pada subjek yang diteliti.

3.2 Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang gunakan adalah data sekunder .Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2016) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Dalam penelitian ini data sekunder adalah berupa data target dan data realisasi penerimaan retribusi sektor pariwisata tahun 2014-2018, penerimaan PAD tahun 2014-2018 dan berbagai macam arsip, surat, dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metoda wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Dinas Pariwisata.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Misalnya dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3.4 Teknik Pengelolaan Data

a. Menghitung Kontribusi Pajak Sektor Pariwisata

Menurut Halim (2012) untuk menghitung kontribusi pajak sektor pariwisata dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Sektor Pariwisata}_n}{\text{Total PAD}_n} \times 100\%$$

Keterangan :

Kontribusi : Persentase pajak sektor pariwisata terhadap total pendapatan daerah

Pajak Sektor Pariwisata_n : Besarnya pajak sektor pariwisata dalam tahun n

Total PAD_n : Total PAD tahun n

b. Mengukur Tingkat Pertumbuhan Pajak Sektor Pariwisata

Menurut (Halim (2012) untuk mengukur tingkat pertumbuhan pajak sektor pariwisata dengan menggunakan rumus :

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x : Laju pertumbuhan pajak sektor pariwisata pertahun

X_t : Realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata pada tahun tertentu

X_(t-1) : Realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata pada tahun sebelumnya

c. Mengetahui Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Sektor Pariwisata

Dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan pajak sektor pariwisata}}{\text{Realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata}} \times 100\%$$

Sumber : Khusufi dan Halim (2012)

d. Mengukur Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Sektor Pariwisata

Dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata}}{\text{Target penerimaan pajak sektor pariwisata}} \times 100\%$$

Sumber : Khusufi dan Halim (2012)

3.5 Metode Analisis Data

1. Mengidentifikasi data-data yang diperlukan.
2. Melakukan pengukuran pajak sektor pariwisata dengan menggunakan rumus.
 - a. Mengukur kontribusi dari pajak sektor pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah
 - b. Mengukur tingkat pertumbuhan pajak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah pertahun.
 - c. Mengukur tingkat efisiensi pemungutan pajak sektor pariwisata.
 - d. Mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak sektor pariwisata.
3. Menganalisis pajak sektor pariwisata dalam pendapatan asli daerah sesuai kategori efisien dan efektivitas.
4. Menyimpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amanda, R. (2010). *Analisis Efisiensi Teknis Bidang Pendidikan Dalam Implementasi Model Kota Layak Anak*. Semarang.
- Anambas, K. K. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2014*. Tarempa.
- Baiquni, wardiyanto dan. (2011). *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*. Bandung.
- Halim, A. dan M. I. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hastuti, R. T. (2010). *Analisis Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta.
- Indonesia, R. (1990). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2000). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2004). *Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Indriantoro, N. dan S. B. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Khusufi, M. S. dan H. A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah edisi 4* (4, ed.). Jakarta: Salemba.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muhani, N. &. (2012). *Peranan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo*. 2, 113–121.
- Puspitasari, E. R. A. (2014). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Semarang.
- Raharjo, A. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Republik Indonesia. (2005). *undang-undang nomor 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah*. Jakarta: Departemen dalam Negeri Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

- Rombang, M. (2013). *Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2012*. Sulawesi Utara.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Supriono, S. (2010). *Potensi dan Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah*. Sumatera Utara.
- Yuliandari, R. (2017). *The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase the Original Regional Income (PAD) in Mataram*.
- Zulmi, F. (2018). *Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung*. Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE



Nama : Rahmad Hidayat

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Desa Sawah, Kab. Kampar/ 22 September 1987

Status : Menikah

Agama : Islam

Email : rahmad.hidayat201@gmail.com

Alamat : Jl.Salam. Gg Salam 7 No 77B Sei Jang
Tanjungpinang

Pekerjaan : PNS Pemprov Kepri

Pendidikan : - SD Negeri 003 Desa Sawah
- SMP Negeri 4 Kampar
- SMA Negeri 4 Kampar
- D3 Akuntansi UIN Suska Riau
- STIE Pembangunan Tanjungpinang